

Edukasi Hasrat: Pendidikan di tengah Wacana Sekularisme dan Kebangsaan

Desire Education: Education amidst the Discourse of Secularism and Nationalism

Abraham Silo Wilar

asilowilar@gmail.com

World Council of Churches, Geneva

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri jejak-jejak edukasi hasrat secara historis, yang dalam hal ini menjadi *fieldword* dari studi ini, dan secara fenomenologis di Indonesia di tengah diskursus sekularisme dan kebangsaan. Sejumlah pertanyaan dapat diajukan terkait potret pendidikan yang berada di tengah himpitan sekularisme dan kebangsaan, misalnya, bagaimana gambaran dunia pendidikan dan manusia (sekaligus masyarakatnya) yang berada pada himpitan sekularisme dan kebangsaan itu? Untuk membahas pertanyaan itu, saya berusaha untuk memfokuskannya pada skop lokalitas, primordialisme agama, dan korupsi sebagai persoalan utama. Ketiga bagian ini ditinjau dalam rangka memperlihatkan peran edukasi hasrat dalam terbentuknya sekularisme dan kebangsaan. Pada topik lokalitas, sentralisasi-desentralisasi menjadi bagian penting untuk ditelusuri; pada primordialisme agama, narasi dari otoritas agama merupakan bagian menarik dalam proses pembentukan sekularisme dan kebangsaan; pada korupsi, kita berurusan dengan kultur korupsi yang sistemik, baik di daerah maupun pusat. Berdasarkan tiga aspek itu, saya hendak menyoroti kembali potret pendidikan pada masa Order Baru, bagaimana perannya. Dari sini saya bergerak untuk menawarkan edukasi hasrat yang saya pinjam dari Timothy Schroeder untuk membicarakan motivasi, kenikmatan, dan penghargaan yang dapat menggoyahkan sekaligus membangun karakter manusia. Dari sini, saya berargumen bahwa edukasi hasrat penting untuk mengelola manusia-manusia dari hasrat kebencian (agamis), hasrat menguasai, dan hasrat kepuasan politik-ekonomi.

Kata-kata kunci: sekularisme, kebangsaan, edukasi hasrat, lokalitas, primordialisme agama, korupsi.

ABSTRACT

This study explores the traces of the desire for education historically and phenomenologically in Indonesia amid secularism and nationalism discourse. Several questions can be asked regarding the portrait of education amid the crush of secularism

and nationalism. For example, what was the picture of the world of education and humans (as well as society) who were in the crush of secularism and nationalism? To address this question, I focus on the scope of locality, religious primordialism, and corruption as the primary problem. These three sections are reviewed to show the role of the desire for education in forming secularism and nationalism. Decentralization is a critical part of exploring the influence of locality in the formation of secularism and nationalism. Narratives of religious authorities show how religious primordialism affects the formation of secularism and nationalism; on corruption, we are dealing with a systemic culture of corruption both regional and central governments. Based on the three factors, I would like to highlight the portrait of education at that time and its role. From here, I move on to offer education on the desire that I borrowed from Timothy Schroeder to talk about motivation, enjoyment, and recognition that can shake and build human character. From this, I argue that education on desire is vital to manage human beings from the desire for hatred (religious), the desire to dominate, and the desire for political-economic satisfaction.

Keywords: secularism, nationalism, desire education, locality, religious primordialism, corruption.

PENDAHULUAN

Sekularisme dan Kebangsaan telah menjadi wacana yang menyusun narasi masyarakat Indonesia. Sekularisme, misalnya, menjadi topik percakapan yang hangat di tengah masyarakat ketika republik ini dalam proses pembentukannya. Pada tahun 1971, B. J. Boland menulis bahwa Indonesia mengambil jalan tengah di saat mendirikan negara. Artinya, Indonesia tidak memilih baik negara sekuler ataupun negara agama.¹ Kendati memilih jalan tengah, sekularisme tidak berarti tidak ada di Indonesia. Kekhawatiran terhadap sekularisme tetap hidup di tengah masyarakat.

Sejajar dengan itu, kebangsaan juga menjadi wacana yang menyusun narasi di masyarakat Indonesia. Sejarah republik ini menunjukkan bahwa gelora semangat kebangsaan adalah bukti dari kaum minoritas dan mayoritas tidak mengidap sindrom inferior.² Bukti itu juga menunjukkan bahwa Republik ini menjadi Rumah Besar bagi kebersamaan setiap perbedaan yang ada. Di era tersebut, Gerry van Klinken, seorang profesor Studi Asia di Universitas Amsterdam, mencatat bahwa

1 B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1971), 112.

2 Robert Hefner mengamati bahwa ini dapat terjadi karena sebagai akibat dari jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut Undang-undang 1945. Robert W. Hefner, "Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia," *Religions* 12, no. 6 (June 7, 2021): 6, <https://www.mdpi.com/2077-1444/12/6/415>.

gelora kebangsaan dapat dilihat dari kehadiran tokoh-tokoh Kristen di pentas politik, misalnya, Ignatius Joseph Kasimo, Soetan Goenoeng Moelia, G.S.S.J Ratulangie, Amir Syarifoeeddin, dan Albertus Soegijapranata (2003).³

Dalam Rumah Bersama itu, potret dunia pendidikan merupakan salah satu wacana yang menarik untuk dikaji. Perjalanan dunia pendidikan di tengah dua wacana tersebut menarik untuk diteliti dengan sejumlah pertanyaan yang melatarinya, misalnya, bagaimana gambaran dunia pendidikan dan manusia (sekaligus masyarakatnya) yang berada pada himpitan sekularisme dan kebangsaan itu? Pertanyaan ini menjadi fokus dari tulisan ini.

Shigeo Nishimura, pengajar di Universitas Kyoto, mencatat tiga paradigma yang penting dalam dunia pendidikan: agama, nasionalis, dan ekonomi. Ketiga ini menjadi titik berangkat tulisan ini untuk mendorong pendidikan hasrat di tengah kekuatan agama, politik, dan ekonomi yang sangat menekan. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk menunjukkan salah satu dasar permasalahan pada potret pendidikan di era Soeharto dan pasca-Soeharto yang berpersoalan dengan sentralisasi-desentralisasi, primordialisme agama, dan korupsi. Saya menawarkan edukasi hasrat secara solutif bagi kultur masyarakat yang didera oleh hasrat kebencian (agamis), hasrat menguasai, dan hasrat kepuasan politik-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas topik ini, saya menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan historika. Dengan pendekatan ini, wacana Sekularisme dan Kebangsaan dibahas melalui tiga hal, yaitu, lokalitas, primordialisme agama, dan korupsi. Ketiganya merupakan topik umum yang mudah ditemui di dalam kajian sejenis. Namun demikian, ketiganya berada di dalam, meminjam istilah Aziz al-Azmeh, pemolaan narasi-narasi historis (*patterning of historical narratives*). Untuk pemolaan itu, saya menggunakan pendekatan lain yang akan dijelaskan di bawah. Pendekatan kedua adalah pendekatan filosofis, yang menganalisis narasi-narasi historis yang

3 Bagian ini dengan sengaja hanya mengacu pada beberapa tokoh Kristen untuk memperlihatkan bahwa sindrom inferior sulit ditemukan pada masa itu melalui peran penting mereka.

telah disampaikan terdahulu akan mengalami pemolaan, sehingga narasi-narasi historis tersebut di tulisan ini bukan berpolakan narasi historis romantisme, tetapi narasi historis filosofis-fenomenologis (dengan intensionalitas untuk melihat jauh ke dalam dari apa yang ada di dalam narasi-narasi historis tersebut).⁴ Pendekatan ini menjadikan narasi historis sebagai lokus pembahasan Edukasi Hasrat. Selanjutnya, di dalam membahas Edukasi Hasrat, saya menggunakan pemikiran Charles Taylor (*Modern Social Imaginaries* dan *A Secular Age*) dan pemikiran Timothy Schroeder demi mengurai Pendidikan, Sekularisme, dan Kebangsaan yang mengekspresikan *Modern Social Imaginaries*, dan yang telah membentuk identitas manusia modern. Secara khusus, jiwa dari manusia modern adalah hasrat mimikri atas “yang-politis”.

Edukasi hasrat menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan karena kedua wacana di atas, yaitu sekulerisme dan kebangsaan. Secara politis, keduanya telah mendefinisikan setiap orang sehingga kepenuhan diri dan yang-ideal tidak ada di tengah wacana tersebut. Yang-politis ini juga hadir di dalam dunia pendidikan dan menjadikan dunia pendidikan sebagai arena reproduksi kekuasaan dan *power exercise* yang dilakukan oleh naradidik ataupun fasilitator. Karena itu, hal-hal yang ada di dalam hasrat perlu diperhatikan di dalam dunia pendidikan.

DISKUSI

Sebagaimana pendekatan historis diaplikasikan untuk pembahasan ini, untuk itu, pertama-tama, diskusi wacana sekularisme dan kebangsaan dalam rentang sejarah perlu dibentangkan. Sudah disebutkan di awal, wacana sekularisme dan kebangsaan telah menyusun narasi republik ini. Selanjutnya, setelah Pancasila dipilih, dan penghapusan tujuh (7) kata di Piagam Jakarta dilakukan, republik ini mengalami dinamika yang bersumber dari kedua wacana di atas. Terkait kebangsaan, beberapa peristiwa berikut penting untuk disebutkan: Gerakan Darul Islam di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo (1942), Aceh (1957-1959) dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Gerakan Separatis

⁴ Aziz Al-Azmeh, *The Times of History: Universal Topics in Islamic Historiography* (Budapest: Central European University Press, 2007), 3-38 Di buku ini, khususnya hal 3-38, al-Azmeh memaparkan beberapa kategorisasi sejarah, yang salah-satunya adalah romantisme. Pemolaan yang saya buat di atas bertolak dari kategorisasi sejarah yang disampaikan al-Azmeh.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat (1958), dan Permesta di Sulawesi (1958-62).

Banyaknya pemberontakan yang terjadi di dalam narasi kebangsaan di era rezim Sukarno memiliki banyak alasan. Dari sekian banyak alasan, mengutip George McTurnan Kahin, Khairul Ummami menuliskan satu alasan, yaitu: seluruh gerakan separatisme pada pemerintahan Sukarno dipicu oleh ketidakpuasan elite daerah atau perwira militer terhadap pemerintah pusat, dan tidak jarang pula akibat adanya rivalitas di tubuh militer dalam memperebutkan posisi dan sumber daya ekonomi dan politik.⁵

Selanjutnya, terkait sekularisme, di samping pemilihan Pancasila, sekularisme menjadi penyusun narasi republik ini dapat dilihat dari perdebatan atas pidato Nurcholish Madjid (1939-2005), seorang cendekiawan Muslim Indonesia, di tahun 1970 di Taman Mini Indonesia.⁶ Sekularisme yang dibahas oleh Madjid berkaitan dengan modernitas, dan sekularisasi.⁷ Namun demikian, Masnawati Maznt mencatat bahwa modernitas dan sekularisasi di dalam pemikiran Madjid tersebut berhubungan dengan agama dan negara. Secara khusus, Maznt menyebutkan penolakan Madjid atas Negara Islam.⁸ Wacana sekularisme paska Kemerdekaan ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari wacana sekularisme pra-Kemerdekaan. Moch Nur Ichwan mencatat saran Supomo pada Juni 1944 untuk menunda wacana tersebut, dan meneruskannya di era Kemerdekaan. Akan tetapi, saran tersebut ditolak oleh Administrasi Militer Jepang. Lebih lanjut, akhirnya, wacana tersebut diteruskan ke BPUPKI dan PPKI.⁹

Setelah masuk era Kemerdekaan, dan rezim Sukarno digantikan oleh rezim Suharto, era baru yang disebut Orde Baru mulai membangun format memerintah

5 Khairul Ummam, "Ali Hasjmy: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959" (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 1.

6 Muhajir, "Pemikiran Sekulerisasi Nurcholish Madjid," 9, https://www.academia.edu/35314011/PEMIKIRAN_SEKULERISASI_NURCHOLISH_MADJID.pdf.

7 Pirhat Abbas, "Paradigma Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi," *Media Akademika: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 22, no. 4 (2007): 248-249.

8 Masnawati Maznt, "Karakteristik Pemikiran Cak Nur Tentang Hubungan Negara Dan Agama," 69, <https://uinmalang.academia.edu/MasnawatiMaznt>.

9 Ichwan, *The Making of a Pancasila State*, 6.

republik ini. Terkait hal itu, Michael John Wood meneliti metodologi yang digunakan oleh Suharto untuk membangun bangsa Indonesia sesaat setelah beliau berhasil menggantikan Presiden Sukarno.¹⁰ Menurut Wood, metodologi yang digunakan oleh rezim Suharto adalah menggunakan “bagian-bagian sejarah di masa lalu” sebagai alat untuk membangun bangsa. Wood mengajukan beberapa bukti bahwa metodologi seperti itu yang ditempuh oleh rezim Suharto sungguh-sungguh dilakukan oleh rezim. Misalnya, film G-30-S/PKI yang diputar di televisi setiap 30 September sepanjang rezim berkuasa, dan pembangunan monumen untuk terus mengingat peristiwa G30S PKI.¹¹ Dengan contoh di atas, rezim Suharto sedang membangun negeri dengan menggunakan satu peristiwa historis, tetapi apa yang dilakukan oleh rezim ini, menurut Wood, tidak berhubungan dengan akurasi historis. Hal itu terjadi karena pembangunan bangsa dengan menggunakan serpihan tertentu dari masa lalu adalah bagian dari industri sejarah (*the history industry*).¹² Saya cenderung menyebutkan aktivitas tersebut sebagai upaya membangun sejarah politis (*the political history*) karena serpihan sejarah digunakan dengan sadar untuk membangun citra rezim Suharto di dalam usahanya rezim membangun bangsa.

Sekaitannya dengan contoh dari Wood, pertanyaan penting yang perlu diajukan di sini adalah: “apakah contoh tersebut juga sedang berbicara tentang dunia pendidikan?” Tanpa keraguan, saya mengatakan, Iya. Contoh tersebut sangat eksplisit berbicara tentang dunia pendidikan – walaupun contoh itu adalah sejarah politis. Pendidikan indoktriner dan pendidikan kebencian. Saya membahas dunia ini di bagian tersendiri di tulisan ini. Namun secara singkat, saya menyinggung di bawah ini.

Rezim Suharto tidak hanya membangun monumen sebagai sarana untuk membangun “sejarah politis” dari rezim, yaitu Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tetapi juga mengeluarkan produk hukum dalam bentuk TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai *national legal standing* untuk melarang PKI,

10 Michael John Wood, “The Historical Past as a Tool for Nation-Building in New Order Indonesia” (McGill University, 2004).

11 Ibid., 16.

12 Ibid.

melakukan pelarangan buku karya John Roosa yang berjudul *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'état in Indonesia*,¹³ dan mencetak keseragaman *textbooks* yang dipelajari di sekolah-sekolah. Semua itu dijadikan sarana yang menunjukkan bahwa Pemerintah sedang mendidik warga negaranya tentang G-30-S/PKI dengan cara indoktriner dan kebencian. Dengan kata lain, di kasus G-30-S/PKI, pendidikan indoktrinasi dan pendidikan kebencian berlangsung sepanjang rezim berkuasa. Bahkan, terkait dengan isu PKI, Presiden Joko Widodo pernah berkata: “Tunjukkan saya mana PKI, saya akan gebuk.”¹⁴

Setelah rezim Suharto turun, gugatan terhadap sejarah politis yang dibentuk oleh rezim Suharto muncul di sana sini. Gugatan muncul dalam bentuk riset, seminar dan publikasi buku dengan berbagai aktor terlibat di dalamnya. Misalnya, Anhar Gonggong dari Universitas Indonesia dikenal luas sebagai salah satu aktor; Ribka Tjiptaning Proletariyati menuliskan buku *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (2002); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan seminar tentang PKI. Namun demikian, arus perlawanan terhadap gugatan tersebut juga muncul di mana mana. Misalnya, massa pada 17 September 2017 mendatangi LBH Jakarta.¹⁵ Semua contoh di atas memberi petunjuk bahwa apa yang telah ditanam oleh rezim Suharto menjadi warisan yang membentuk historiografi Indonesia pasca-Suharto. Masih ada beberapa contoh lagi yang masih bisa disebutkan.

Lokalitas

Desentralisasi yang terjadi di era pasca-Suharto telah membuka ruang bagi “yang-lokal” untuk muncul ke permukaan. Richard Bennett, seorang pengajar di Universitas Princeton, USA, menyebutkan bahwa desentralisasi sebenarnya telah menjadi isu sejak tahun 1990-an yang dilokomotifi oleh Ryass Rasyid.¹⁶ Isu ini

13 William H. Frederick, “Introduction,” in *Indonesia: A Country Study*, ed. William H. Frederick and Robert L. Worden, 6th ed. (Washington, DC: The Federal Research Division of the Library of Congress, lvi, 2011), lvi.

14 Putu Merta Surya Putra, “Jokowi: Tunjukkan Mana PKI, Saya Akan Gebuk,” *Liputan6*, last modified 2017, accessed September 21, 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/2976591/jokowi-tunjukkan-mana-pki-saya-akan-gebuk>.

15 Ayomi Amindoni, “Pembiaran’ Polisi Dan ‘Legitimasi’ Gebuk PKI Di Insiden LBH Jakarta,” *BBC News Indonesia*, last modified 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41308696>.

16 Richard Bennet, “Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia’s ‘Big Bang’ 1998-

baru terealisasi sesaat setelah Suharto turun karena tuntutan untuk kemandirian pemerintahan. Presiden B. J. Habibie, sebagai penerus Suharto, langsung merespons tuntutan itu dengan menunjuk Hartato Sastrosoenarto sebagai Menko Reformasi Administrasi dan Supervisi Pembangunan dan menunjuk Rasyid dan tim akademiknya untuk menyusun respons Pemerintah atas tuntutan tersebut.¹⁷ Hal ini yang menjadi pembuka bagi “yang-lokal” untuk dapat muncul ke permukaan.

Isu lokalitas ini menjadi topik penting di dalam menyusun historiografi republik ini pasca-Suharto. Sepanjang rezim Suharto, lokalitas menjadi hal yang terpinggirkan. Namun, pasca-Suharto, hal itu mendapat ruang untuk muncul.¹⁸ Di dalam buku ini, para kontributor menunjukkan kompleksitas yang ada di dalam “yang-lokal”. Misalnya, Loraine V. Aragon menyebutkan adanya kompetisi menguasai *resources* di antara kaum elit di Sulawesi Tengah.¹⁹ Kompetisi ini memiliki pengaruh sosial di daerah tersebut. Fenomena pemekaran wilayah juga menjadi hal yang menarik untuk dicatat di sini, sebab, Nunik Retno Herawati menunjukkan bahwa di era Orde Baru pemekaran wilayah terjadi walau sangat terbatas. Setelah Orde Baru, dengan semangat Otonomi Daerah, pemekaran terjadi di mana-mana.²⁰

Hal tersebut dimungkinkan karena Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 129 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah muncul dan menjadi *national legal standing* untuk kegiatan pemekaran wilayah. Terkait hal itu, Dik Roth melakukan riset tentang pemekaran wilayah dalam konteks relasi tripartit antara Sulawesi Selatan, Luwu dan Toraja.²¹ Relasi yang sentralistis (Makassar-centric) menjadi *raison d’etre* dari pemekaran provinsi Luwu Raya agar dapat lepas dari Provinsi

2010,” *Princeton University*, last modified 2018, accessed September 21, 2018, https://successfultsocieties.princeton.edu/sites/successfultsocieties/files/Policy_Note_ID132.pdf.

17 Ibid., 1.

18 Dik Roth, “Many Governors, No Province: The Struggle for a Province in the Luwu Tana Toraja Area in South Sulawesi,” in *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, ed. Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007).

19 Loraine V. Aragon, “Elite Competition in Central Sulawesi,” in *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, ed. Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (Leiden: KITLV Press, 2007), 48.

20 Unik Retno Herawati, “Pemekaran Daerah Di Indonesia,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2011): 3.

Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar. Namun demikian, penduduk Toraja menolak bergabung ke dalam Luwu Raya.²¹

Di samping UU 22 Tahun 1999, Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²² Menurut Michael Feener, Aceh memiliki sejarah yang kompleks, misalnya, memiliki Masa Emas Islam di abad ke-17, mengalami kolonialisme belanda di tahun 1873, ketegangan antara ulama tradisional (fiqh Syafi'i, sufism Khalidi- Naqshbandi dan dayah. Tokohnya Tgk. Muda Waly) dengan ulama modernis (PUSA; Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh. Tokohnya Daud Beureueh. Tahun 1953 beliau menjadi tokoh sentral pemberontakan untuk pembentukan Negara Islam atau Darul Islam).²³ Selanjutnya, setelah kolonialisme Belanda keluar dari Aceh, kekerasan terjadi dengan ABRI/TNI karena muncul aspirasi kemerdekaan Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka. Sejarah kompleks ini, menurut Ikhwan, diakhiri dengan Tsunami tahun 2004 yang membawa setiap pihak bertikai untuk melupakan pertikaian dan fokus kepada penanggulangan.²⁴ Setelah Tsunami, tahun 2005, penanda-tanganan MOU Helsinki berlangsung. Pihak Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Indonesia dan mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, melakukan penanda-tanganan MOU tersebut.²⁵ Undang-undang Otonomi Khusus tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya Pemerintahan Daerah Istimewa, dan Bab 1 dari MOU Helsinki memuat butir tentang Hak Istimewa Aceh untuk membentuk Qanun sebagai Azas Pemerintahan.²⁶ Dua produk tersebut menciptakan Aceh hari ini. Dengan adanya *Qanun* tersebut, *Wilayatul Hisbah (Shari'a police)*, yang bertugas sebagai penjaga pelaksanaan

21 Ibid., 137.

22 Muzakkir Thaib et al., "Implementation of Law in Aceh after Application Qanun Jinaya," *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6, no. 9 (2007).

23 R. Michael. Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013), xvi.

24 Ikhwan, "The Implementation of Sharia in Aceh: Dilemma of Establishing an Islamic State (Dar as-Salam)" (Aletheia University, Taiwan, 2013), xxvii.

25 Ibid., xxviii.

26 Ibid., xxxi.

Shari'a di kehidupan sehari-hari, turut dibentuk. Sepak terjang dari Polisi Shari'a mendapat liputan dari banyak pihak.²⁷

Singkatnya, Otonomi Daerah menyingkapkan kepentingan laten yang tersimpan sepanjang sentralisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Namun demikian, karena begitu deras pemekaran wilayah terjadi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PP) No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagai pengganti UU No.22 Tahun 1999.²⁸ Otonomi Daerah, dalam hal ini, memiliki dua sisi. Pertama, menjadikan "yang-lokal" untuk berperan penting dan krusial bagi konteksnya sendiri; Kedua, kekuasaan itu justru berpotensi untuk menjadi alat untuk mengambil jarak dengan kebangsaan. Di sini, pertautan antara sentralisasi-desentralisasi; Otonomi Daerah-Pemerintah Pusat menjadi dua bagian yang runyam. Namun, kita perlu menggarisbawahi pada bagian ini bahwa lokalitas telah mendapat tempat di era ini.

Primordialisme Agama

Primordialisme agama menyeruak di era pasca-Suharto. Pendekatan otoritarianisme yang digunakan oleh Suharto telah turut membantu fenomena tersebut muncul. Fenomena ini muncul di dalam bentuk usro-usro atau kelompok sel di kampus-kampus seperti ITB, UI, UGM, dan lainnya. Yon Machmudi memberikan gambaran tentang fenomena ini sebagai berikut:²⁹

Jemaah Tarbiyah gained momentum and attracted many students during the 1990s. In this decade, many of its activists won control of student executive bodies and placed their best cadres in the position of head of student senates. In 1993, a Jemaah Tarbiyah cadre, Mustafa Kamal, won the student elections in the Faculty of Humanities of the University of Indonesia and became the first member of Jemaah Tarbiyah to gain highest position of the student government at the faculty level. The following year, Jemaah Tarbiyah activist Zulkieflimansyah secured the position of general chairman of the student senate at university level in the same institution. Since then, student governments at the university and faculty levels in other prestigious universities have come under the control of Jemaah Tarbiyah activists, pushing aside candidates from the existing Muslim student associations, such as Muslim Student Association, Himpunan Mahasiswa Islam

27 "No Title," https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_pemberlakuanjinayah.

28 Herawati, "Pemekaran Daerah Di Indonesia," 4.

29 Yon Machmudi, "Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)" (Australia National University, 2006), 2.

(HMI) or Indonesia Islamic Students Movement, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Selanjutnya, fenomena primordialisme agama ini menubuh di dalam Jemaah Tarbiyah untuk menjadi tubuh sosial, dan ia kemudian bermetamorfosa menjadi tubuh politik: masuk menjadi bagian dari Partai Politik (PKS). Ahmad-Norma Permata, sejalan dengan Machmudi, berpendapat bahwa kehadiran PKS adalah bentuk dari hadirnya Islamisme di republik ini.³⁰ Menurut Permata, fenomena Islamisme adalah fenomena global yang muncul di banyak negara Muslim, dari Timur Tengah, Asia Tengah sampai Asia Tenggara. Fenomena ini muncul dengan wajah moralis dan religius sebagai antitesa dari rezim pemerintah di setiap negara yang korup.³¹

Satu contoh yang diangkat oleh Permata adalah FIS (*the Algerian Islamic Salvation Front*) yang lahir dari Gerakan-gerakan Islam di tahun 1960-70-an dan menjadi organisasi politik yang terorganisir di tahun 1980-an. Lalu, pada Pemilihan Legislator distrik dan provinsi di tahun 1990, FIS berhasil memenangi pemilihan, mengalahkan partai pemerintah, dengan mengantongi kemenangan 54%.³² Namun, pemerintah menolak hasil tersebut dan penolakan itu direspons dengan demonstrasi massa. Akhir dari ketegangan itu adalah pemilihan ulang yang diadakan di bulan Desember 1990. Di pemilu ulang ini, FIS mendapatkan suara 48%.³² Fenomena Islamisme sebagai suatu fenomena global seperti yang disampaikan oleh Permata mendapatkan konfirmasi dari riset Ali Munhanif. Munhanif mendapati fenomena serupa terjadi di Mesir, meski Islamisme di Mesir menempuh rute yang berbeda dari Islamisme di Indonesia.³³

Di tempat yang lain, Mujiburrahman melihat ada wacana tertentu dan konteks sosial-politiknya yang membentuk relasi Islam-Kristen berada dalam situasi psikologis “merasa-terancam” di masing-masing pihak.³⁴ Wacana itu adalah

30 Ahmad-Norma Permata, “Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006” (Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008).

31 Ibid., 7.

32 Ibid., 8.

33 Ali Munhanif, “Different Routes to Islamism: History, Institutions, and the Politics of Islamic State in Egypt and Indonesia” (McGill University, 2010).

34 Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*

Kristenisasi dan Islamisasi.³⁵ Wacana ini berada dalam konteks sosial-politik yang melibatkan negara.³⁶ Menurut saya, wacana tersebut sedang menyampaikan adanya sejumlah paradigma yang operatif di kehidupan sosial-politik, yaitu, paradigma kebencian, paradigma penaklukan, dan paradigma hegemoni agama (baca: *use religion to abuse religion*).

Bertolak dari apa yang disampaikan oleh Machmudi, Permata, dan Mujiburrahman, fenomena munculnya primordialisme agama tidak lepas dari konteks sosial-politik di mana fenomena tersebut muncul. Konteks sosial-politik terbentuk tidak bisa dilepaskan dari kondisi manusia yang terlibat di dalamnya. Itu berarti apa yang dialami manusia di dalam konteks tersebut penting juga untuk ditelaah.

Hal lain yang perlu dicatat tentang fenomena ini adalah fenomena ini juga terjadi di dunia pendidikan. Riset yang dilakukan oleh Hairus Salim HS, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah atas fenomena ini di Sekolah Menengah Umum Negeri di Yogyakarta memberi afirmasi tentang kehadiran fenomena tersebut di dunia pendidikan.³⁷ Fenomena ini muncul karena ada perubahan lanskap dari Yogyakarta. Yogyakarta mendaku diri dibangun berdasarkan klaim sosial, yaitu, *the city of tolerance*, mengalami perubahan karena pengaruh dari gerakan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, di dalam negeri, dan gerakan-gerakan Islam di tahun 1970an dari Timur Tengah.³⁸ Lebih jauh disebutkan pengaruh tersebut terlihat di dalam usaha bagaimana Muhammadiyah membangun ketaatan masyarakat Muslim pada ajaran-ajaran Islam secara formal, munculnya Majelis Mujahidin Indonesia pimpinan Abubakar Basyir, dan kampanye Khilafa oleh HTI di Yogyakarta.³⁹ Segala aktivitas dari organisasi Islam tersebut terlihat pengaruhnya dalam bentuk merosotnya pengaruh ajaran kebatinan dalam masyarakat Yogyakarta.⁴⁰

(Leiden: Amsterdam University Press, 2006), 19.

35 Ibid.

36 Ibid., 20.

37 Hairus Salim, Najib Kailani, and Nikmal Azekiyah, *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi Dan Resistensi Di Sekolah Menengah Umum Negeri Di Yogyakarta* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011).

38 Ibid., 25.

39 Ibid., 25-26.

40 Ibid., 25.

Selanjutnya, era Reformasi semakin melapangkan jalan bagi fenomena ini semakin bertumbuh dan berbuah.⁴¹

Bentuk-bentuk kehadiran fenomena Islamisme di sekolah dapat dilihat dari berbagai kegiatan sekolah, misalnya, pemakaian pembatasan dalam kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, menghindari persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menundukan pandangan dengan non-Muhrim, shalat tepat waktu, membaca al-Qur'an, dan shalat Dhuha kala waktu istirahat, berjilbab besar, dan lainnya. Di samping itu, ada Buku Saku sebagai alat kontrol untuk menerapkan cita-cita 'rajawali Darussalam'.⁴² Buku itu berisikan tentang rincian seperti tahap dan strategi dakwah.⁴³ Penegakan disiplin dan *mentoring* juga menjadi alat kontrol agar cita-cita tersebut *on track*.⁴⁴

Korupsi

Menjalankan pemerintahan yang sentralistik, rezim Suharto telah membentuk kultur korupsi yang sistemik.⁴⁵ King menunjuk salah satu bentuk dari kultur korupsi tersebut adalah KKN. Lebih jauh, Maira Martini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor, misalnya, kualitas hukum yang rendah, jaringan politik yang kuat, gaji rendah, dan lemahnya independensi pengadilan.⁴⁶ Apa yang disampaikan oleh King, dalam tulisan Martini, adalah salah satu format korupsi, yaitu: korupsi birokrasi dan administrasi. Format korupsi tersebut sangat meluas, dan memiliki pengaruh di dalam lingkungan bisnis.⁴⁷ Selanjutnya, Martini menyebutkan format korupsi lainnya, yaitu: korupsi politis. Format ini sangat berhubungan dengan warisan rezim Suharto yang menggunakan sumber publik untuk mendapatkan

41 Ibid., 26.

42 Ibid., 34.

43 Ibid., 35.

44 Ibid., 35–36.

45 Peter King, "Corruption Ruins Everything: Gridlock over Suharto's Legacy in Indonesia," *The Asia-Pacific Journal* 6, no. 3 (2008): 1.

46 Maria Martini, "Causes of Corruption in Indonesia," *U4 and Transparency International*, 1, last modified 2012, accessed June 30, 2020, https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/338_Causes_of_corruption_in_Indonesia.pdf.

47 Ibid., 2.

dukungan atau topangan jaringan patronase.⁴⁸ Secara khusus, Martini menyebutkan bahwa warisan rezim Suharto adalah institusi-institusi lemah dan struktur sosial berdasarkan klientisme. Puncak dari warisan ini adalah 41 anggota DPRD Malang ditangkap oleh KPK.⁴⁹ Sebelum penangkapan 41 anggota DPRD Malang tersebut, KPK telah melakukan penangkapan terhadap banyak orang, misalnya, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan lainnya.⁵⁰ Hampir seluruh partai politik di Indonesia memiliki kader-kader yang korup.⁵¹ Bahkan, dana bencana di Lombok juga menjadi sasaran korupsi oleh anggota DPRD.⁵²

Di samping hal tata kelola negara, persoalan korupsi harus dilihat dalam relasi dengan ekonomi dan pembangunan. Aung Kyaw Phyto melakukan riset tentang kebijakan ekonomi di Indonesia era Suharto. Tahun 1966 menyaksikan tingkat inflasi mencapai 1,195%, dan karena itu rezim Suharto dengan dibantu oleh Tim Ekonomi-lulusan Amerika mencoba mengangkat ekonomi republik saat itu agar terjadi stabilitas. Usaha Tim Ekonomi meluncurkan program stabilisasi dengan bantuan IMF.⁵³ Hal Hill dan Dionisius Narjoko menyebutkan bahwa rezim Suharto mengawali pemerintahannya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan liberalisasi, dan kebijakan menghadirkan ekonomi terbuka dan industrialisasi yang cepat.⁵⁴ Di tahun 1980, khususnya pertengahan 1980 Indonesia menjadi negara eksportir bahan baku alam (kayu, karet, kimia, dan seterusnya),⁵⁵ perusahaan-

48 Ibid., 3.

49 Wahid Nurdin, "Anggota DPRD Kota Malang Nyaris Habis Ditangkap KPK, Dari 45 Orang Tinggal 4," *Tribun News*, last modified 2018, accessed September 23, 2018, <https://www.tribunnews.com/regional/2018/09/04/anggota-dprd-kota-malang-nyaris-habis-ditangkap-kpk-dari-45-orang-tinggal-4>.

50 Bobby Chandra, "7 Elite Demokrat Ini Tersandung Kasus Korupsi," *Tempo*, last modified 2014, accessed September 21, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/604384/7-elite-demokrat-ini-tersandung-kasus-korupsi>.

51 Dusep Malik and Edwin Firdaus, "Dalam Sepekan, 5 Politikus PDIP Berurusan Dengan KPK," *Viva.Co.Id*, last modified 2018, accessed September 21, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1043800-dalam-sepekan-5-politikus-pdip-berurusan-dengan-kpk>.

52 Abraham Utama, "Korupsi Dana Bencana Gempa Lombok, Kejaksaan Bidik Tersangka Baru," *BBC News Indonesia*, last modified 2018, accessed September 23, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980>.

53 Aung Kyaw Phyto, "Policy Outcomes in Indonesia before and After Democratization" (Martin School of Public Policy, University of Kentucky, 2012), 15–16.

54 Hal Hill and Dionisius Narjoko, "Managing Industrialisation in a Globalising Economy: Lessons from the Soeharto Era," in *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, ed. Edward Aspinall and Greg Fealy (Australia: ANU Press, 2010), 49.

55 Ibid., 53.

perusahaan negara memegang peran penting di dalam perekonomian, top 10 keluarga menjadi pemain utama dengan penguasaan aset perusahaan di atas 50%, hutang luar negeri meningkat,⁵⁶ rasio hutang dengan GDP masih aman, dan sektor industri di akhir tahun 1990 mengalami kolaps.⁵⁷ Orientasi dan kebijakan ekonomi turut menentukan ruang untuk terbentuknya praktik korupsi.

Desentralisasi yang terjadi pasca-Suharto tidak menunjukkan bahwa penegakan hukum di daerah mendapatkan ruang untuk mandiri dan kuat. Sebaliknya, penegakan hukum sangat lemah. Tidak ada mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk bisa menegakan hukum agar praktik korupsi berkurang.⁵⁸

Potret Pendidikan Indonesia

Sebelum menelisik lebih jauh gagasan Taylor dan Schroeder, saya hendak mengurai potret Pendidikan di Indonesia, sebagaimana pemaparan Shigeo Nishimura. Nishimura menunjukkan tiga paradigma yang ada di dunia pendidikan di republik ini. Paradigma pertama adalah pendidikan keagamaan dari kelompok agama Islam yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Tokoh-tokoh penting dari paradigma pertama adalah Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah dan Hasyim Asyari dari *Nadlatul Ulama*. Paradigma pertama ini berjalan masing-masing. Masing-masing kelompok mendirikan lembaga pendidikannya. Organisasi NU mempertahankan pendidikan tradisional keagamaan berbasis pesantren, dan organisasi Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dasar, menengah dan tinggi di mana-mana. Mata pelajaran umum menjadi bagian dari pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan dari setiap organisasi di atas.

Muhammad Cholil menyebutkan di dalam pendidikan keagamaan di pesantren membaca kitab kuning adalah hal yang penting. Untuk dapat melakukan hal tersebut, ilmu *nahwu* dan *shorof* menjadi dua ilmu yang perlu dipelajari oleh santri.⁵⁹

56 Ibid., 54.

57 Ibid., 56.

58 Martini, "Causes of Corruption in Indonesia," 5.

59 Muhammad Cholil, "Hubungan Antara Penguasaan Nahwu Dan Shorof Santri Dengan Kemampuan Menerjemah Teks Arab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Demak" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014), 5.

Sementara itu, dalam catatan Cholil, terdapat beberapa metode pembelajaran Kitab Kuning, yaitu: metode weton atau bandongan, metode sorogan, metode hafalan (*muhafadzah*), dan metode diskusi (*munazharah*).⁶⁰ Para santri juga mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi di samping pendidikan keagamaan yang diikuti di pondok pesantren.

Kedua, paradigma nasionalis yang diusung karena pergumulan politik. Paradigma kedua di dalam tulisan Nishimura diwakili oleh sosok Ki Hajar Dewantara (Menteri Pendidikan & Kebudayaan Pertama), dan Mohammad Syafei (Menteri Pendidikan & Kebudayaan Ketiga). Menurut Nishimura, kedua tokoh ini adalah pendiri dari pendidikan Pancasila, yang kemudian nanti pendidikan sejenis ini muncul di era Sukarno dan Suharto.⁶¹ Nishimura menyebut pendidikan Pancasila di kedua era tersebut sebagai “Pancasila-isasi Pendidikan Nasional.” Namun demikian, kedua presiden di atas berbeda dalam menggunakan Pancasila, tetapi keduanya sama-sama indoktriner di dalam operasionalisasi Pendidikan Pancasila.⁶²

Nishimura menuliskan bahwa UU tentang Perguruan Tinggi Tahun 1961 menyatakan hal berikut:⁶³

The purpose of higher education is “to breed the builders of a socialist society that embodies the spirit of Pancasila.” In this period, education for socialism was regarded as the ultimate goal of education under the name of Pancasila.

Selanjutnya, Nishimura menuliskan bahwa pergantian rezim Sukarno ke rezim Suharto telah membuat Pancasila ditafsirkan oleh rezim Suharto dalam bingkai anti Sosialisme, dan rezim Suharto melarang textbooks yang digunakan di era Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno.⁶⁴ Terkait perubahan tafsir Pancasila di dalam Pendidikan Nasional, DPR pada tahun 1972 menuliskan di dalam GBHN hal berikut: “The purpose of education was to bring up people who can realize the ideal of Pancasila.”⁶⁵ Karena rezim Suharto dipercaya sebagai rezim anti Komunis

60 Ibid., 72–74.

61 Shigeo Nishimura, “The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia,” *Southeast Asian Studies* 33, no. 3 (1995): 27, 309.

62 Ibid., 28, 310.

63 Ibid., 25, 307–326.

64 Ibid., 28, 310.

65 Ibid., 27, 309.

karena memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi, Nishimura mencatat, maka kalimat di atas dipahami sebagai berikut: “tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia pembangunan yang dapat berkontribusi ke dalam rencana pembangunan nasional.”⁶⁶

Apa yang disampaikan oleh Nishimura tentang tujuan pendidikan yang berorientasi ekonomi seperti yang disebutkan di kalimat sebelumnya tampaknya mendapatkan konfirmasi dari tulisan George McT. Kahin tentang Mohammad Natsir.⁶⁷ Dalam pertemuan Kahin dengan Nasir pada awal Januari 1991, Nasir menyatakan pandangannya tentang republik ini di bawah rezim Suharto yang memberi tekanan pada dunia pendidikan ke bidang ekonomi:

...for he saw most of its upper strata as having become grossly materialistic, selfish, and shorn of social conscience; with this development being accompanied by a widening gap between rich and poor.”⁶⁸

Selanjutnya Nishimura mencatat praktik dari Pendidikan Pancasila dalam tafsiran rezim Suharto terlihat di dalam pelaksanaan Penataran P4.⁶⁹ Bahkan, P4 dijadikan sumber untuk Pendidikan Pancasila.⁷⁰ Rezim Suharto juga merubah kurikulum. Dalam Kurikulum Revisi Tahun 1975 PMP (Pendidikan Moral Pancasila) menggantikan *Civic Education* (yang ada di era Sukarno).⁷¹ Hal serupa terjadi di tahun 1984 di mana Kurikulum Revisi Tahun 1984 memasukan pelajaran baru, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kurikulum 1984 ini menjadikan Pendidikan Sejarah sebagai bagian dari Pendidikan Moral Pancasila.⁷²

Setelah Suharto turun dari kursi kepresidenan, Raihani mencatat bahwa perubahan- perubahan terjadi di dunia pendidikan. Dalam catatan Raihani, Sistem Pendidikan Nasional 2003 (Sisdiknas) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai berikut:

66 Ibid.

67 George McT. Kahin, “In Memoriam: Mohammad Natsir (1907-1993),” 165, accessed September 22, 2018, https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54016/INDO_56_0_110696954_1_8_165.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

68 Ibid.

69 Nishimura, “The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia,” 29, 311.

70 Ibid., 29, 311–330.

71 Ibid., 29, 311.

72 Ibid., 31, 313.

developing each student's potential to become people with faith and piety towards God the Only One, good morality, good health, knowledge, intelligence, creativity, independence, and to become democratic and responsible citizens [my translation].⁷³

Raihani menggaris-bawahi beberapa kata kunci penting di dalam Sisdiknas 2003, yaitu, nilai religius dan moral, kompetensi-kompetensi intelektual, dan nilai-nilai demokrasi.

Di tempat lain, Christopher Bjork menunjukkan bahwa desentralisasi juga terjadi di dunia pendidikan. Namun, riset Bjork menunjukkan bahwa desentralisasi --yang mensyaratkan transfer kekuasaan ke lokal—tidak berjalan di dunia pendidikan. Kekuasaan yang tersentralisasi (di era Orde Baru) ditransfer ke aktor-aktor lokal seperti pimpinan masyarakat, orang tua, para guru, dan pengelola sekolah tetapi aktor berada di bawah pengaruh sentralisasi Orde-Baru.⁷⁴

Pendidikan, Sekularisme dan Kebangsaan: Perspektif Charles Taylor

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa ketiga butir di atas (Lokalitas, Primordialisme Agama, dan Korupsi) akan menjadi *fieldwork* untuk menyusun bagian ini. Dengan demikian, narasi sejarah yang disampaikan oleh setiap butir di atas akan mengalami pemolaan di bagian ini. Bentuk pemolaan narasi sejarah di atas akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan filosofis yang merujuk kepada dua tokoh, Charles Taylor dan Timothy Schroeder. Hasilnya, seperti yang disebutkan di bagian terawal, bagian ini akan memamparkan suatu pola narasi sejarah filosofis-fenomenologis tentang Pendidikan di tengah wacana Sekularisme dan Kebangsaan.

Apa yang terjadi di republik ini seperti yang dapat dilihat di setiap butir di atas sebenarnya berkaitan erat dengan wajah manusia. Secara khusus, butir-butir tersebut menunjukkan wajah manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Bila demikian, maka pertanyaan-pertanyaan berikut penting untuk diajukan sebagai

73 Raihani, "Education Reforms in Indonesia in the Twenty-First Century," *International Education Journal* 8, no. 1 (2007): 173.

74 Christopher Bjork, "Transferring Authority to Local School Communities in Indonesia," in *Educational Decentralization: Asian Experiences and Conceptual Contributions in Indonesia*, ed. Christopher Bjork (Dordrecht: Springer Netherlands, 2006), 143.

proses awal pemolaan, yaitu: apa hubungan antara apa yang terjadi dengan wajah-wajah manusia yang terlibat di dalamnya, dan wajah manusia seperti apa yang sedang ditampilkan menjadi hal yang menarik untuk didalami. Lalu, dikaitkan dengan dunia pendidikan, bagaimana wajah manusia di dunia pendidikan? Apa yang dunia pendidikan sedang didik?

Di dalam tulisan ini, dengan bantuan Charles Taylor dan Timothy Schroeder, saya akan menunjukkan wajah manusia yang ditampilkan di republik ini melalui setiap butir di atas, dan relasinya dengan wacana sekularisme, kebangsaan dan pendidikan.

Sekularisme

Charles Taylor menulis empat buku yang berkaitan dengan sekularisme, yaitu, *The Malaise of Modernity* (1991), *Sources of the Self: The Making of Modern Identity* (terbit 2001), *Modern Social Imaginaries* (2004), dan *A Secular Age* (2007). Keempat buku, ini menurut saya, saling berkaitan. Kaitan di antara keempat buku tersebut adalah, menurut saya, Taylor sedang mengamati suatu kehidupan manusia yang hidup di suatu era (ia menyebut era ini sebagai *A Secular Age* –dan era ini berkaitan erat dengan modernitas yang memiliki sejumlah kesulitan), dan di dalam era tersebut, manusia mulai menyusun identitas diri modern karena era yang dihidupinya adalah suatu imajinasi sosial modern. Hidup di dalam era ini, manusia (*the self*) telah terdefiniskan terlebih dahulu identitas modernnya oleh era ini, sebab, era ini adalah imajinasi sosial modern. Oleh karena itu, pemahaman manusia tentang identitas diri, misalnya, terbentuk bukan karena pertama-tama idealisme untuk membangun pemahaman masih menghantui manusia, tetapi karena terjadi subordinasi hidup oleh sejumlah kekuatan sehingga kapasitas untuk bertindak mandiri tidak terjadi.⁷⁵ Di dalam subordinasi ini, *fullness*, suatu kata kunci penting di dalam pemikiran Taylor, mengalami penyerpihan, menjadi kepingan-kepingan. Di saat ini terjadi, di sanalah era sekuler berlangsung.⁷⁶ Kepingan-kepingan tersebut

⁷⁵ Charles Taylor, *Modern Social Imaginaries* (London, 2004), 24–33.

⁷⁶ Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 13–25; Lihat juga Douglas H. Shantz, “The Place of Religion in a Secular Age: Charles Taylor’s Explanation of

telah menjadi lanskap dan faktor menentukan untuk membentuk pemahaman, termasuk di dalamnya untuk percaya (*belief*), diri, dan lainnya.

Walaupun masyarakat yang dimaksud di tulisan Taylor adalah masyarakat Barat dan mereka hidup di dalam era Sekular, dengan sejumlah alasan yang relevan apa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut memiliki relevansinya bagi masyarakat yang ada di republik ini. Pertama, konsep sekularisme tidak monolitik. Kajian-kajian tentang sekularisme menunjukkan keragaman sekularisme. Contoh, buku berjudul *Global Secularisms in a Post Secular Age*⁷⁷ menunjukkan keragaman tersebut dengan mencantumkan Sekularisme Inggris, Sekulerisme India, Sekulerisme Rwanda, Sekulerisme Bolivia, Sekulerisme Cina, dan lainnya. Bahkan, terkait dengan keragaman itu, Roberta J. Newman menganalisis lokasi dan peran dua situs sekuler di dalam kedua negara, yaitu *The Memorial Hall to the Victims of the Nanjing Massacre* di Cina, dan *the Gettysburg National Military Park, Pennsylvania*, sebab, keduanya menjadi situs peziarahan. Dalam analisisnya, Newman mendapati bahwa kedua situs tersebut adalah situs penting bagi masing-masing negara, dan karena pentingnya kedua situs itu (dalam level terdalam) Newman menyebut peristiwa pentingnya kedua situs itu sebagai “when the Secular is Sacred.”⁷⁸

Kedua, Moch Nur Ichwan menyebutkan bahwa negara-negara mayoritas Muslim juga mengalami sekulerisme sejak era klasik.⁷⁹ Ichwan menyebutkan karya Ira Lapidus yang di dalamnya menyebutkan bahwa Khalifah Umayyad diinstitutionalkan sebagai dinasti kerajaan yang mengadopsi dan mengadaptasi model Sasanian dan Bizantium.⁸⁰ Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ichwan

the Rise and Significance of Secularism in the West,” accessed September 22, 2018, Douglas H. Shantz.

77 Michael Rectenwald, Rochelle Almeida, and George Levine, eds., *Global Secularisms in a Post-Secular Age* (Boston, MA: De Gruyter, 2015).

78 Roberta J. Newman, “When the Secular Is Sacred: The Memorial Hall to the Victims of the Nanjing Massacre, and the Gettysburg National Military Park as Pilgrimage Sites,” in *Global Secularisms in a Post-Secular Age*, ed. Michael Rectenwald, Rochelle Almeida, and George Levine (Boston, MA: De Gruyter, 2015), 262.

79 Ichwan, *The Making of a Pancasila State*, 2.

80 Ibid.; Karya Ira Lapidus yang dikutip oleh Ichwan adalah Ira M. Lapidus, “State and Religion in Islamic Societies,” *Past and Present* 151, no. 3 (1996): 3–27.

ini penting untuk digarisbawahi karena republik Indonesia memiliki mayoritas Muslim dan wacana sekularisme masih menghantui.

Ketiga, Graeme Smith menunjukkan keragaman arti Sekularisme. Setidaknya, dalam catatan Smith, sekularisme Barat berarti babak baru dari Kristianitas, dan pemisahan absolut antara ruang publik dengan ruang privat, dan tempat agama di ruang privat.⁸¹ Menurut saya, poin pertama yang disampaikan Smith sangat penting sebab sekularisme bukan berarti absennya agama di ruang publik tetapi agama hadir di dalam substansi yang menubuh di dalam praktik kesejahteraan, keamanan, kebaikan dan kebijaksanaan yang bisa dirasakan oleh banyak orang.

Apa yang telah disampaikan Taylor, Newman, Ichwan, dan Smith menunjukkan bahwa fenomena sekularisme dapat terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya, wajah manusia yang terlibat di dalam sekularisme penting untuk dicatat.

Bertolak dari uraian di atas, misalnya, praktik korupsi era Suharto dan post Suharto, menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah salah satu bentuk kehadiran fenomena sekularisme di bidang ekonomi di republik ini. Sebabnya adalah praktik tersebut merupakan presentasi imajinasi sosial modern dan sekaligus *malaise* dari modernitas yang terjadi di republik ini.

Hal serupa terjadi di dalam praktik menyingkirkan textbooks yang digunakan di era rezim Sukarno oleh rezim Suharto. Atau, pelarangan buku John Roosa. Praktik sejenis ini dilakukan oleh manusia yang berada di era sekularisme, dan karena itu praktik tersebut sedang menyampaikan wajah manusia yang telah terdefiniskan identitasnya oleh sekularisme dan berhasratkan kebencian.

Kebangsaan

Pokok Kebangsaan yang dijelaskan di atas, khususnya melalui poin Lokalitas dan Primordialisme Agama, nampaknya memperlihatkan fenomen yang sama seperti yang ada di Sekularisme seperti yang disampaikan oleh Taylor. Di sini

81 Graeme Smith, *A Short History of Secularism* (New York, NY: I.B. Tauris, 2008), 2–3.

suatu menggarisbawahi dari Lokalitas dan Primordialisme Agama penting untuk dicantumkan. Beberapa penekanan tersebut adalah:

Praktik primordialisme agama yang berhubungan dengan konteks sosial-politik yang akhirnya menguasai ruang politik, misalnya, PKS; dan ruang publik, misalnya, pendidikan di Yogyakarta;

Praktik pendidikan indoktrinasi yang dilakukan oleh negara;

Praktik penggunaan kekuasaan dan praktik pencarian kepuasan politik-ekonomi.

Butir-butir di atas menunjukkan wajah manusia yang terlibat di dalamnya. Wajah manusia di butir-butir ini adalah wajah politis, sebab, hal-hal yang terjadi di negeri ini di dalam empat hal yang menyusun narasi republik ini tidak menunjukkan salah satu dari sejumlah praktik agama hadir di dalam substansi seperti yang dijelaskan oleh Smith.

Di atas, Smith dengan gamblang menyebutkan kehadiran agama di dalam substansi yang menubuh di dalam praktik kesejahteraan, keamanan, kebaikan dan kebijaksanaan yang bisa dirasakan oleh banyak orang, tetapi kedua butir di atas tidak ada yang pas dengan penjelasan Smith. Itu berarti “yang-politis” tersebut ada di manusia di setiap peristiwa yang ada di dua butir di atas. Yang-politis ini menunjukkan manusia yang berhasratkan kepuasan politik-ekonomi, dan kebencian. Ia telah mendefinisikan terlebih dahulu (baca: membentuk) pemahaman manusia tentang dirinya. Dalam bahasa Charles Taylor di dalam bukunya *Modern Social Imaginaries*, hal itu adalah imajinasi sosial modern yang memiliki peran membentuk pemahaman tentang identitas diri (tanpa melibatkan apa yang disebut Taylor sebagai *ideal order*), melakukan subordinasi hidup, dan membuat yang ideal berkeping-keping.⁸² Situasi ini, menurut Taylor, adalah “*a secular age*”, dan karena itu hidup di dalam situasi itu berarti hidup di dalam “*a secular age*”.

Menurut saya “yang-politis” menjadi wajah manusia karena intensionalitas manusia terarah keluar dan menjadikan yang-di-luar-dirinya sebagai hal objektif bagi dirinya. Bahkan, menurut Jacques Lacan, yang-di-luar-dirinya itu menjadi objek yang dinikmati.⁸³ Hal inilah yang membuat intensionalitas manusia terarah keluar.

82 Taylor, *Duke University Press*, 14–15.

83 Jacques Lacan, “Desire and the Interpretation of Desire in Hamlet (Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise),” *Yale French Studies* 55, no. 56 (1977): 12–13.

Eksistensi “yang-politis” yang kontinual di dalam kehidupan ini mengambil banyak bentuk. Setiap bentuk itu pada dirinya-sendiri, sesungguhnya, sedang menawarkan suatu format pendidikan: lihat, dengar dan ikuti. Tanpa disadari, banyak orang telah dididik oleh “yang-politis”. Taylor di dalam bukunya *A Secular Age* berusaha melampaui “yang-politis”. Taylor berusaha meretas jalannya sendiri.⁸⁴

Pendidikan

Sebelum melangkah lebih jauh, saya harus mengingatkan bahwa “yang-politis” seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, menurut saya, perlu dibedakan dengan “yang-politis” yang ada di dalam bukunya Taylor yang berjudul “The Politics of Recognition”. Pandangan ini saya dapatkan melalui Disertasi Anthony Joseph Palma yang menjadikan buku Taylor yang berjudul “The Politics of Recognition” sebagai fondasi untuk membahas aspek edukasional dari pemikiran Taylor khususnya tentang rekognisi keragaman.⁸⁵ Yang-politis dalam sekularisme dan kebangsaan adalah sesuatu yang mendatangkan kenikmatan bagi para aktor, sementara “yang-politis” di dalam “*The Politics of Recognition*” adalah sesuatu yang edukasional. Itulah perbedaan substansial di antara yang-politis di kedua bidang.

Pada bagian ini, saya akan mengurai terlebih dahulu “yang-politis” seperti penjelasan di atas. Penjelasan tersebut untuk menunjukkan bahwa pendidikan di tengah wacana sekularisme dan kebangsaan berada di dalam bayang-bayang “yang-politis”. Secara khusus, “yang-politis” di atas bisa dilihat dari praktik perumusan tujuan pendidikan yang selalu berbeda dan berkaitan dengan rezim politik yang menguasai republik, atau suatu peristiwa historis yang sedang menyampaikan suatu pendidikan kepada masyarakat. Contoh, praktik pendidikan yang dijalankan oleh rezim melalui pelarangan PKI. Bahkan, menurut saya, praktik pendidikan indoktriner tentang nasionalisme juga menunjukkan kehadiran “yang-politis” di dunia pendidikan.

84 Taylor, *A Secular Age*, 11.

85 Anthony Joseph Palma, “Recognition of Diversity: Charles Taylor’s Educational Thought” (University of Toronto, 2014), 19.

Lebih jauh, menurut saya, “yang-politis” telah membuat terdefiniskan terlebih dahulu. Ini menyebabkan dunia pendidikan menjadi arena pendefinisian setiap manusia yang ada di dalamnya, dan sekaligus pertarungan untuk mencari kekuasaan. Sehingga, dengan demikian, mengajar adalah bentuk pertunjukan kuasa dari narasumber terhadap nara-didik bukan, misalnya, proses menuju *fulness* bagi naradidik dan narasumber.

Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah: “bagaimana dengan pendidikan agama?” Apakah pendidikan agama bisa terlepas dari “yang-politis?” Pertama-tama, kata agama bukan jaminan bahwa ia terlepas atau imun dari pengaruh, khususnya “yang-politis”. Oleh karena itu, kedua, melihat milieu/ lingkungan di mana agama menjadi salah satu bagiannya menjadi hal yang penting: sekularisme dan Kebangsaan.

Edukasi Hasrat Perspektif Timothy Schroeder

Edukasi hasrat menjadi penting untuk dipikirkan karena hasrat tidak berada di ruang vakum. Di samping itu, pendidikan bukan tentang *transferring knowledge*. Oleh karena itu, memikirkan edukasi hasrat menjadi urgensi kontemporer. Hasrat adalah konstruksi: buatan.⁸⁶ Sebagai konstruksi, eksistensi hasrat telah menjadi objek riset. Meneliti hasrat berarti melihat bagaimana ia dibentuk, sejauh mana ia berdampak dalam kehidupan, bagaimana relasinya dengan ras, gender, dan lainnya.⁸⁷ Contoh, Mirza meneliti bagaimana hasrat menjelaskan fenomena keberhasilan dan kegagalan bagi perempuan hitam, dan bagaimana hasrat dididik agar kegagalan dapat menjadi keberhasilan. Seajar dengan itu, Ann Laura Stoler juga melakukan riset tentang edukasi hasrat yang bertolak dari karya Foucault yang berjudul “History of Sexuality”, dan melihat bagaimana hasrat ditata di dalam tatanan kolonial.⁸⁸ Dua karya terakhir tentang edukasi hasrat dikutip di sini untuk

86 William B. Irvine, *On Desire: Why We Want What We Want* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 3–4.

87 Heidi Safia Mirza, *Race, Gender and Educational Desire: Why Black Women Succeed and Fail* (New York, NY: Routledge, 2009).

88 Ann Laura Stoler, *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things* (Durham: Duke University Press, 1995).

menjadi fondasi yang menjelaskan bahwa tulisan ini berada di dalam rangkaian jejak penelitian yang sudah ada terlebih dahulu.

Setelah menguraikan Lokalitas, Primordialisme Agama, Pendidikan, dan Korupsi, saya melihat bahwa ada suatu mimikri yang berlangsung di belakang setiap fenomena tersebut. Mimikri tersebut terlihat dari berulangnya praktik penggunaan kekuasaan, praktik kebencian, dan praktik pencarian kepuasan politik-ekonomi. Hal itu terjadi karena “yang-politis” sebagai imajinasi sosial modern memiliki pesona yang dihasrati oleh siapa saja dari kalangan mana saja, dan dalam keterpikatan tersebut manusia-manusia tersebut menjadi tawanan dari hasrat “yang-politis” tersebut.

Di tempat lain, Charles Taylor membahas “yang-politis” lainnya di dalam *the Politics of Recognition* sebagai anti-tesis dari “yang-politis” yang ada di era Sekuler dan hadir di dalam wacana Kebangsaan.⁸⁹ Perbedaan di antara keduanya adalah: “yang-politis” di dalam buku tersebut berhubungan dengan dunia pendidikan, dan “yang-politis” di era Sekuler dan wacana Kebangsaan adalah tentang hasrat kekuasaan, kebencian dan kepuasan politik-ekonomi. Bertolak dari hal tersebut, edukasi hasrat diperlukan agar di tengah serpihan-serpihan yang telah membentuk manusia di era sekularisme *fullness* yang di dalam pemikiran Taylor mendapatkan pemulihan.

Dalam rangka melakukan edukasi atas hasrat, rekognisi bisa menjadi titik tolak. Meminjam tulisan Palma, Taylor mengatakan bahwa rekognisi adalah suatu kebutuhan vital bagi manusia karena ia turut membentuk identitas.⁹⁰ Lebih jauh, Taylor mengatakan rekognisi datang bersama otentisitas identitas. Palma mencatat pemikiran Taylor tersebut memiliki dampak terhadap pendidikan multikulturalisme.⁹¹ Namun demikian, rekognisi memiliki problematikanya sendiri

89 Saat menuliskan bagian ini, saya masih belum mendapatkan buku tersebut. Karena itu, saya menyandarkan diri kepada karya-karya lain yang menggunakan *the Politics of Recognition* sebagai framework di karya-karya tersebut.

90 Palma, “Recognition of Diversity: Charles Taylor’s Educational Thought,” 152.

91 Ibid., 154.

karena ia hanya bisa diberikan oleh pihak ketiga, di samping memiliki keragaman makna.⁹²

Menggunakan rekognisi sebagai titik tolak untuk edukasi hasrat berarti melihat bahwa “singularitas” yang dibawa oleh “yang-politis” ke dunia pendidikan perlu dikritisi untuk menyingkapkan isi dari singularitas tersebut. Seperti yang dapat dilihat di uraian di atas, “yang-politis” telah membentuk identitas singular dari banyak manusia yang terlibat di dalam setiap peristiwa di empat butir pembahasan di atas. Oleh karena itu, pendidikan bukan tentang reproduksi hasrat mimikri kekuasaan, sehingga naradidik masuk ke dunia pendidikan agar menjadi penguasa baru, dan narasumber di dalam dunia pendidikan bukan sang penguasa yang bisa bertindak semena-mena.

Schroeder mencatat ada tiga wajah dari hasrat, yaitu, motivasi, kenikmatan dan penghargaan, tetapi ketiga wajah tersebut sesungguhnya berbicara tentang satu fenomena.⁹³ Setiap hal tersebut berhubungan dengan *original intentionality*.⁹⁴ Sebelum lebih jauh, saya ingin menyampaikan di sini hal-hal yang termasuk di dalam istilah *Desire*, yaitu: *desiring*, *wanting*, dan *wishing*.⁹⁵ Terkait dengan hasrat mimikri kekuasaan, pemikiran Schroeder tentang motivasi, kenikmatan, dan penghargaan menjadi aspek-aspek penting untuk menyingkapkan hasrat mimikri tersebut. Menurut saya, yang-politis telah menjadi motivasi bagi naradidik atau narasumber untuk memunculkan hasrat mimikri, sebab ada kenikmatan dan penghargaan yang ditawarkan oleh yang-politis tersebut. Banyaknya orang yang terpesona oleh yang-politis dan orang-orang tersebut tertawan di dalamnya merupakan suatu penanda bahwa ketiga hal tersebut sungguh operatif di dalam hasrat manusia-manusia tertawan tersebut.

Untuk melakukan edukasi hasrat, rekognisi digunakan ke dalam. Artinya, pengakuan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Di sini, arti rekognisi yang disampaikan oleh Ricoeur seperti yang dicatat oleh Palma, yaitu *to make sense*,

92 Ibid., 159.

93 Timothy Schroeder, *Three Faces of Desire* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 5–6.

94 Ibid., 3.

95 Ibid., 5.

menjadi relevan. Oleh karena itu, rekognisi tersebut berbicara tentang *to make sense* hasrat. Itu berarti *desiring* itu tidak otomatis diikuti, tetapi ia mendapatkan pengelolaan ke dalam diri untuk disingkapkan motivasi, kenikmatan dan penghargaan yang melekat pada dirinya sendiri. Praktik edukasional ini sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan sebab pendidikan bukan tentang *transferring knowledge* untuk akumulasi kekuasaan, tetapi suatu proses *to make sense* ke dalam. Format pendidikan seperti inilah yang hilang di tengah wacana sekularisme dan kebangsaan. Pendidikan di tengah wacana sekularisme dan kebangsaan justru telah menjadi mesin reproduksi kekuasaan. Itu ditunjukkan dengan manusia-manusia yang secara gamblang memperlihatkan hasrat kebencian, hasrat menguasai, dan hasrat kepuasan politik-ekonomi. Manusia-manusia jenis ini adalah manusia-manusia politis yang tidak mengedukasi hasrat mereka.

Setelah melihat keseluruhan uraian di atas, saya memandang urgensi melihat tiga wajah di dalam hasrat sebagai fokus edukasi hasrat. Sehingga, dengan demikian, suatu pendidikan bukan sekedar tentang kurikulum dan fasilitas pendukung, tetapi juga tentang aspek mental dan lingkungan yang juga menjadi forma pendidikan pada dirinya sendiri. Aspek mental dan lingkungan ini perlu mendapatkan pengakuan di dalam dunia pendidikan. Ini penting agar wacana di dunia pendidikan, misalnya, wacana poskolonialisme menjadi materi ajar yang didukung oleh lingkungan dan mental pascakolonial.

KESIMPULAN

Potret pendidikan tampaknya kurang memberi porsi yang pas pada “pendidikan manusia”, dalam hal ini edukasi hasrat. Di tengah dera praktik kebencian, keinginan kekuasaan, dan pemanfaatan kekuasaan secara semena, edukasi hasrat dapat menjadi salah satu solusi bagi dunia pendidikan yang menolak hasrat kebencian (agamis), hasrat menguasai, dan hasrat kepuasan politik-ekonomi. Dengan demikian, masyarakat tumbuh dengan mental yang berbeda dari yang telah diperlihatkan oleh sejarah panjang perjalanan bangsa ini, era Soeharto dan pasca-Soeharto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Pirhat. "Paradigma Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Modernisasi." *Media Akademika: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 22, no. 4 (2007).
- Al-Azmeh, Aziz. *The Times of History: Universal Topics in Islamic Historiography*. Budapest: Central European University Press, 2007.
- Amindoni, Ayomi. "'Pembiaran' Polisi Dan 'Legitimasi' Gebuk PKI Di Insiden LBH Jakarta." *BBC News Indonesia*. Last modified 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41308696>.
- Aragon, Loraine V. "Elite Competition in Central Sulawesi." In *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Bennet, Richard. "Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's 'Big Bang' 1998- 2010." *Princeton University*. Last modified 2018. Accessed September 21, 2018. https://successfultsocieties.princeton.edu/sites/successfultsocieties/files/Policy_Note_ID132.pdf.
- Bjork, Christopher. "Transferring Authority to Local School Communities in Indonesia." In *Educational Decentralization: Asian Experiences and Conceptual Contributions in Indonesia*, edited by Christopher Bjork. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: Martinus Nijhoff, 1971.
- Chandra, Bobby. "7 Elite Demokrat Ini Tersandung Kasus Korupsi." *Tempo*. Last modified 2014. Accessed September 21, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/604384/7-elite-demokrat-ini-tersandung-kasus-korupsi>.
- Cholil, Muhammad. "Hubungan Antara Penguasaan Nahwu Dan Shorof Santri Dengan Kemampuan Menerjemah Teks Arab Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Demak." Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Frederick, William H. "Introduction." In *Indonesia: A Country Study*, edited by William H. Frederick and Robert L. Worden. 6th ed. Washington, DC: The Federal Research Division of the Library of Congress, lvi, 2011.
- Hefner, Robert W. "Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia." *Religions* 12, no. 6 (June 7, 2021): 415. <https://www.mdpi.com/2077->

1444/12/6/415.

Herawati, Unik Retno. "Pemekaran Daerah Di Indonesia." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2011).

Hill, Hal, and Dionisius Narjoko. "Managing Industrialisation in a Globalising Economy: Lessons from the Soeharto Era." In *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. Australia: ANU Press, 2010.

Ichwan, Moch Nur. *The Making of a Pancasila State: Political Debates on Secularism, Islam and the State in Indonesia*. Tokyo: SOIAS Research Paper Series, 2012.

Ikhwan. "The Implementation of Sharia in Aceh: Dilemma of Establishing an Islamic State (Dar as-Salam)." Aletheia University, Taiwan, 2013.

Irvine, William B. *On Desire: Why We Want What We Want*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Kahin, George McT. "In Memoriam: Mohammad Natsir (1907-1993)." Accessed September 22, 2018. https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54016/INDO_56_0_110696954_1_8_165.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

King, Peter. "Corruption Ruins Everything: Gridlock over Suharto's Legacy in Indonesia." *The Asia-Pacific Journal* 6, no. 3 (2008).

Lacan, Jacques. "Desire and the Interpretation of Desire in Hamlet (Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise)." *Yale French Studies* 55, no. 56 (1977).

Lapidus, Ira M. "State and Religion in Islamic Societies." *Past and Present* 151, no. 3 (1996).

Machmudi, Yon. "Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)." Australia National University, 2006.

Malik, Dusep, and Edwin Firdaus. "Dalam Sepekan, 5 Politikus PDIP Berurusan Dengan KPK." *Viva.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed September 21, 2018. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1043800-dalam-sepekan-5-politikus-pdip-berurusan-dengan-kpk>.

Martini, Maria. "Causes of Corruption in Indonesia." *U4 and Transparency International*. Last modified 2012. Accessed June 30, 2020. https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/338_Causes_of_corruption_in_Indonesia.pdf.

- Maznt, Masnawati. "Karakteristik Pemikiran Cak Nur Tentang Hubungan Negara Dan Agama." <https://uinmalang.academia.edu/MasnawatiMaznt>.
- Mirza, Heidi Safia. *Race, Gender and Educational Desire: Why Black Women Succeed and Fail*. New York, NY: Routledge, 2009.
- Muhajir. "Pemikiran Sekulerisasi Nurcholish Madjid." https://www.academia.edu/35314011/PEMIKIRAN_SEKULERISASI_NURCHOLISH_MADJID.pdf.
- Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press, 2006.
- Munhanif, Ali. "Different Routes to Islamism: History, Institutions, and the Politics of Islamic State in Egypt and Indonesia." McGill University, 2010.
- Newman, Roberta. J. "When the Secular Is Sacred: The Memorial Hall to the Victims of the Nanjing Massacre, and the Gettysburg National Military Park as Pilgrimage Sites." In *Global Secularisms in a Post-Secular Age*, edited by Michael Rectenwald, Rochelle Almeida, and George Levine. Boston, MA: De Gruyter, 2015.
- Nishimura, Shigeo. "The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia." *Southeast Asian Studies* 33, no. 3 (1995).
- Nurdin, Wahid. "Anggota DPRD Kota Malang Nyaris Habis Ditangkap KPK, Dari 45 Orang Tinggal 4." *Tribun News*. Last modified 2018. Accessed September 23, 2018. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/09/04/anggota-dprd-kota-malang-nyaris-habis-ditangkap-kpk-dari-45-orang-tinggal-4>.
- Palma, Anthony Joseph. "Recognition of Diversity: Charles Taylor's Educational Thought." University of Toronto, 2014.
- Permata, Ahmad-Norma. "Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006." Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008.
- Phyo, Aung Kyaw. "Policy Outcomes in Indonesia before and After Democratization." Martin School of Public Policy, University of Kentucky, 2012.
- Putra, Putu Merta Surya. "Jokowi: Tunjukkan Mana PKI, Saya Akan Gebuk." *Liputan6*. Last modified 2017. Accessed September 21, 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/2976591/jokowi-tunjukkan-mana-pki-saya-akan-gebuk>.
- Raihani. "Education Reforms in Indonesia in the Twenty-First Century." *International Education Journal* 8, no. 1 (2007).
- Rectenwald, Michael, Rochelle Almeida, and George Levine, eds. *Global Secularisms*

- in a Post-Secular Age*. Boston, MA: De Gruyter, 2015.
- Roth, Dik. "Many Governors, No Province: The Struggle for a Province in the Luwu Tana Toraja Area in South Sulawesi." In *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Salim, Hairus, Najib Kailani, and Nikmal Azekiyah. *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi Dan Resistensi Di Sekolah Menengah Umum Negeri Di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.
- Schroeder, Timothy. *Three Faces of Desire*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Shantz, Douglas H. "The Place of Religion in a Secular Age: Charles Taylor's Explanation of the Rise and Significance of Secularism in the West." Accessed September 22, 2018. Douglas H. Shantz,.
- Smith, Graeme. *A Short History of Secularism*. New York, NY: I.B. Tauris, 2008.
- Stoler, Ann Laura. *Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham: Duke University Press, 1995.
- Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
- . *Modern Social Imaginaries*. London, 2004.
- Thaib, Muzakkir, H. Hasballah, Suhaidi, and Zulkarnaini Abdullah. "Implementation of Law in Aceh after Application Qanun Jinaya." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6, no. 9 (2007).
- Ummam, Khairul. "Ali Hasjmy: Penyelesaian Konflik Darul Islam Aceh Tahun 1957-1959." Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Utama, Abraham. "Korupsi Dana Bencana Gempa Lombok, Kejaksan Bidik Tersangka Baru." *BBC News Indonesia*. Last modified 2018. Accessed September 23, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980>.
- Wood, Michael John. "The Historical Past as a Tool for Nation-Building in New Order Indonesia." McGill University, 2004.
- "No Title." https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_pemberlakuanjinayah.